

RENCANA KERJA TAHUN 2025



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
024-3585944, 3548691

dpmpptsp@semarangkota.go.id

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM 17
Kelurahan Mangkangk Kulon, Kecamatan
Tugu, Kota Semarang

DAFTAR ISI

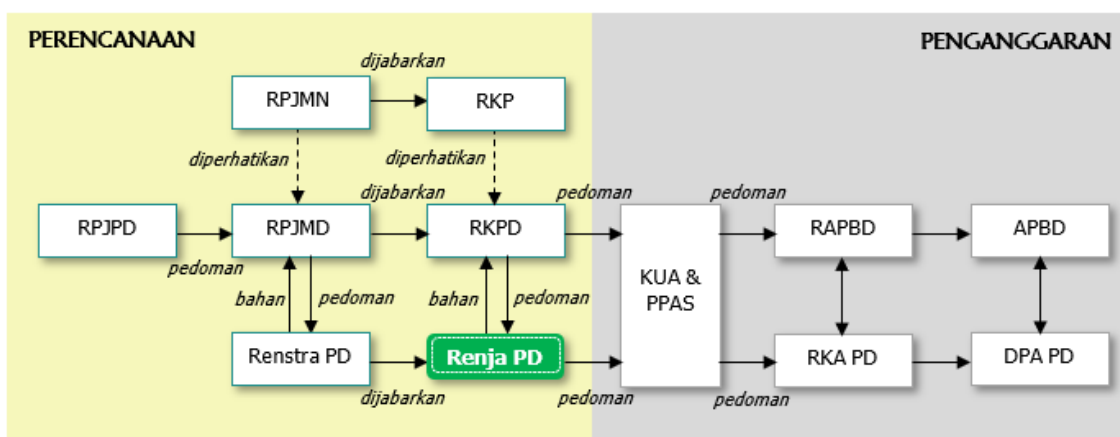
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024	9
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Semarang	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Semarang	37
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Semarang ..	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG.....	60
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Semarang	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA SEMARANG	65
BAB V PENUTUP.....	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang Nomor 90/050/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;

- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
- x. Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Semarang Nomor 90/050/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DPMPSTP KOTA SEMARANG
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPSTP KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPMPSTP KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 DPMPSTP Kota Semarang

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3744 penanam modal	3.697 penanam modal	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3683 penanam modal	4513 Penanam Modal	122,54 %	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3700 Penanam Modal	3700 Penanam Modal	98,82%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	5 buah	3 Buah	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	3 buah	3 buah	100%	Jumlah fasilitas/inse ntif yang bisa diberikan kepada investor	5 Buah	5 Buah	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen	6 dokumen	100%	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-				
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian	Laporan Evaluasi Pelaksanaan	1 dokumen	2 dokumen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku	3691 Kegiatan usaha	4513 Penanaman Modal	122,54 %	Jumlah Kesepakatan Kemitraan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal			Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			
		Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-				
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	1 kegiatan	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	100%	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 dokumen	3.697 penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
									Kabupaten/ Kota			
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1 dokumen	3 Buah	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	654 investor	675 investor	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	556 Investor	113,01%	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541 Investor	541 Investor	100%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	5 kegiatan	Jumlah Promosi Investasi	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	Jumlah Promosi Investasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	-	-	-	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pameran	7 kegiatan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 dokumen	8 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	85,71%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	96%	95,63%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	95%	95,67%	100,71%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non	95%	95%	98,96%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
									Perizinan sesuai SP			
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	100%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	100%	100%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	100%	100%
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000 kegiatan usaha	6000 kegiatan usaha	100%	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 pelaku usaha	2400 pelaku usaha	100%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	-
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap	900 kegiatan usaha	900 kegiatan usaha	100%	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
					Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	800 kegiatan usaha	800 kegiatan usaha	100%	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi	750 Kegiatan Usaha	750 Kegiatan Usaha	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
									Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 nilai	1 (nilai)	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	2 (nilai)	100%	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	2 (nilai)	100%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	10 %	12,49%	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	10,31%	109,33%	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	7%	70%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 pelaku usaha	19 pelaku usaha	100%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	31 perusahaan	18 perusahaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	19 kegiatan usaha	19 kegiatan usaha	100%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	19 Kegiatan Usaha	19 Kegiatan Usaha	105,56%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
									Perizinan Berusaha			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	100%	95%	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96%	96%	100%	1 Dokumen	96%	96%	96%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100%	100%	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	1 Dokumen	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja Administrasi	100%	100%	Persentase Kinerja Administrasi	100%	100%	100%	Persentase Kinerja Administrasi	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
		dan Pelaporan Keuangan SKPD			dan Pelaporan Keuangan SKPD				dan Pelaporan Keuangan SKPD			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	9 dokumen	9 dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	11 dokumen	100%	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	11 dokumen	122,22%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	66,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
	Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD			DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Perubahan DPA			
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	150%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangann SKPD	100%	100%	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	100%	100%	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	100%	100%
2.18.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	49 orang/bulan	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	100%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	18 laporan	18 laporan	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	18 Laporan	18 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
					anan/Semestera n SKPD				wulanan/Se mesteran SKPD			
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	100 %	100%
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 buah	100 buah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	200 unit	100%	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 Unit	200 Unit	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	100%
2.18.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	174 jenis	174 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5000 orang	5000 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2000 kegiatan	2000 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem	6 jenis	6 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	2 dokumen	2 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pembayaran Honor TPHL	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
									yang Disediakan			
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan	1 unit	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Penyediaan	34 unit	23 unit	Dinas Operasional	17 unit	17 unit	100%	Jumlah Kendaraan	34 Unit	34 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8 = (7/6)		9	10	11 = (10/4)
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangandan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mebeleur	5 unit	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	100%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30 unit	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	190 Unit	

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang melaksanakan tugas 6 program, 12 kegiatan, dan 39 sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja outcome pada program ini antara lain sebagai berikut :

- a. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD: 100%
- b. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD : 100%
- c. Presentase Peningkatan Kemampuan ASN : 100%
- d. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD: 100%

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi : 3683 penanam modal

3) Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) : 492 Investor

4) Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Izin Terbit Sesuai SP : 95%

5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Rasio Daya Serap Tenaga Kerja : 2 (nilai)

6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal : 96%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan DPMPSTP Kota Semarang Tahun 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.501.133.195	14.289.632.943	91,19%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.618.180	13.553.380	92,18%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.204.440	1.193.640	99,52%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.610.080	1.602.880	99,10%
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.961.990	1.954.790	99,55%
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.363.680	2.352.880	99,63%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.961.990	1.954.790	99,54%
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.090.080	1.082.880	99,63%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.425.920	3.411.520	99,34%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.128.490.517	7.674.667.798	99,58%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.837.042.837	7.385.923.158	94,42%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	287.980.000	285.300.000	94,24%
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.090.080	1.082.880	99,07%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.287.520	1.278.880	99,34%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.090.080	1.082.880	99,33%
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.952.000	60.900.000	99,34%
05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	62.952.000	60.900.000	96,74%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.051.090.748	4.462.951.969	96,74%
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.888.586.834	1.758.523.026	88,36%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.486.308	61.327.118	93,11%
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.350.273	16.841.000	77,15%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.964.900	16.523.800	91,78%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	799.688.060	529.837.825	66,19%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.240.014.373	2.079.899.200	66,26%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.298.240	1.522.812.300	92,85%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	623.130.240	597.172.300	97,91%
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.168.000	925.640.000	95,83%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.683.510	554.747.496	99,30%
09.01	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kend. Dinas Jabatan	36.318.180	34.584.000	80,44%
09.02	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lingkungan	403.272.500	308.224.386	95,23%
09.05	Pemeliharaan Mebel	363.600	75.000	76,43%
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.729.230	211.864.110	20,63%
02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.665.446.626	1.502.084.757	84,84%
2.01	Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	903.961.203	872.421.077	90,19%
01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	573.158.271	548.724.259	96,51%
01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	330.802.932	323.696.818	95,74%
2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	761.485.423	629.663.680	97,85%
02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	88.429.505	79.591.600	82,69%
02.02	Penyediaan Peta Potensi & Peluang Usaha Kab/Kota	673.055.918	550.072.080	90,01%
03	Program Promosi Penanaman Modal	1.830.917.151	1.492.389.088	81,73%
2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	1.830.917.151	1.492.389.088	81,51%
01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp283.964.853	265.273.800	81,51%
01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.546.952.298	1.227.115.288	93,42%
04	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.300.692.269	3.067.270.093	79,32%
2.01	Pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab/Kota	3.300.692.269	3.067.270.093	92,93%
01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.144.592.003	1.100.940.683	92,93%
01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.191.482.697	1.104.851.187	96,19%
01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan	164.989.625	161.735.609	92,73%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp799.627.944	699.742.614	98,03%
05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	561.960.573	432.305.610	87,51%
2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kab/Kota	561.960.573	432.305.610	76,93%
01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	217.100.000	194.402.800	76,93%
01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	344.860.573	237.902.810	89,55%
06	Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	850.526.728	836.997.463	68,99%
2.01	Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	850.526.728	836.997.463	98,41%
01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	850.526.728	836.997.463	98,41%

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 28 Sub Kegiatan pada DPMPTSP Kota Semarang adalah sebesar Rp. 23.710.676.542,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 21.620.679.954,- atau sebesar (91,19%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.089.996.588,-. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut dengan uraian berikut :

- a. Sisa pengadaan barang/jasa untuk kelengkapan dan penunjang kantor dan Mal Pelayanan Publik;
- b. Selisih antara standar harga satuan dan harga beli;
- c. Efisiensi penggunaan dan pembayaran listrik, air, telephone, dan pemeliharaan mesin lainnya;
- d. Efisiensi makanan dan minuman serta perjalanan dinas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPPTSP Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dalam urusan bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semarang s.d Tahun 2023

	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :										
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	7%	7%	12,49%	10,31%	7%	7%
Sasaran :										
1. Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi (dalam juta)	24.086,799	25.684,059	27.362,089	29.277,425	31.326,856	24.662,472	27.205,700	27.362,089	29.277,425
2. Terwujudnya Pelayanan Prima	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,5%	95,5%	96%	95,63%	95,69%	95,5%	95,50%
	Nilai AKIP	74	75	77	78	79	77,05	77,25%	77	80,3

Sumber : DPMPPTSP Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

DPMPTSP Kota Semarang memiliki tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” memiliki 3 (tiga) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “persentase peningkatan nilai investasi Kota”, telah melampaui target, dimana capaian peningkatan nilai investasi sebesar 10,31% dari target sebesar 7%. Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pemulihan ekonomi yang sangat pesat pasca Pandemi Covid-19. Meningkatnya nilai investasi pasca pandemi Covid-19 ini sekaligus dapat membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa Kota Semarang, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sedangkan Sasaran DPMPTSP Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase peningkatan nilai investasi Kota”.

Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 10,31 % dari target sebesar 7% (capaian 109,33%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

- b. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran **Meningkatnya Nilai Investasi** memiliki indikator “Nilai Investasi” telah dapat melampaui target, dimana nilai realisasinya (dalam juta) sebesar 27.205.700 dari target sebesar 25.684.059.
- 2) Sasaran **Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha** memiliki indikator “Persentase izin terbit sesuai SP” telah melampaui target dimana nilai realisasinya adalah 95,69%, dari target sebesar 95%;
- 3) Sasaran **Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah** memiliki indikator “Nilai AKIP” telah dapat melampaui target, dimana nilai realisasinya sebesar 77,25% dari target sebesar 75%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang penyelenggaraan urusan penanaman modal juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4

**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023**

URAIAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1. Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah nilai investasi (dalam juta)	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	24.662.472	27.205.700	27.362.089	29.277.425
2. Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor)	448	492	541	595	654	675	556	541	595
3. Meningkatnya persentase investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	7%	7%	12,49	10,31%	7%	7%
4. Meningkatnya persentase izin terbit sesuai SP (Standar Pelayanan)	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,50%	95,50%	96%	95,63%	95,69%	95,50%	95,50%

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di bidang penanaman modal menjadi salah satu penyumbang keberhasilan untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang berbasis keunggulan lokal dengan cara membangun iklim usaha yang kondusif di Kota Semarang. Berdasarkan tabel 2.4. diatas, dapat diketahui bahwa dari keempat indikator kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai dengan tahun 2023 seluruh indikator telah melampaui target.

Nilai Investasi Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 27.205.700 (dalam juta), melampaui target nilai investasi tahun 2023 dengan persentase sebesar 109,33%. Selain itu pada tahun 2023 terdapat 556 investor berskala nasional (PMA/PMDN) yang menanamkan modalnya di Kota Semarang telah melebihi target kinerja tahun 2023 yaitu 492 investor. Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Meningkatnya investasi juga menumbuhkan iklim bisnis di Kota Semarang. Semakin banyak investasi maka semakin banyak pula bisnis-bisnis baru bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang secara jelas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan yaitu :

- Semarang Business Forum ke-16 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Grand Hyatt Jakarta;
- Sharing Session DPMPTSP dengan Akademisi dan Pengusaha sebanyak 5 kali;
- Temu Bisnis di Batam, Medan, dan Yogyakarta;
- Pameran Promosi Potensi Investasi sebanyak 2 kali;
- Promosi Media Cetak dan Elektronik; dan
- Penyusunan Kajian Potensi Investasi Bidang Industri Kota Semarang.

Pada tahun 2023 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berhasil mencapai target persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 95,69% melebihi target yang ditetapkan yaitu 95,5%. Prioritas kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan penanaman modal yaitu 28 kali fasilitasi pendampingan OSS RBA dan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha sebanyak 2.100 NIB.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan bidang penanaman modal yaitu adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

Permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.
- Tingginya tingkat instabilitas kebijakan maupun regulasi yang baku yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Kota Semarang untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti;

b. Peluang:

- Tuntutan masyarakat terkait kemudahan aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.
- Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti.
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pengungkit pembangunan ekonomi daerah.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- Adanya regulasi yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti, serta peningkatan kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan.
- Adanya dorongan dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menjadi institusi yang terpercaya.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Adanya isu aksesibilitas keterjangkauan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.
- b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang berpengaruh pada nilai realisasi investasi.
- c. Belum Optimalnya proses pelayanan perizinan secara Online, sehingga masih perlu adanya pelayanan keliling dan pendampingan perizinan online.
- d. Perlunya upaya peningkatan kapasitas bagi petugas pelayanan perizinan dan non perizinan baik internal DPMPTSP Kota Semarang maupun petugas pelayanan dari OPD-OPD teknis.
- e. Perlunya adaptasi yang cepat terhadap perkembangan teknologi yang massif dalam pengelolaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- f. Belum optimalnya koordinasi antara Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah **“Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan **infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;

Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, penurunan **kemiskinan** serta penghapusan **kemiskinan ekstrem**;

Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan **penyediaan infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
 - a. Penanganan genangan banjir dan rob
 - b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
 - c. Penataan kawasan strategis perkotaan
 - d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
 - e. Penanganan kawasan kumuh
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;
 - b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
 - c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
 - d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
 - e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, penurunan **kemiskinan** serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
 - b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin

- c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
 - d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
- a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarananya
 - b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
 - c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya DPMPSTSP Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas yang kedua, yaitu **“Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan”**.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review untuk membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayann Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				20.451.360.181	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				20.451.360.181	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3713 penanam modal	841.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	713 penanam modal	841.000.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Semarang	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	2 buah	450.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Semarang	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	2 buah	450.000.000	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian	1 Dokumen	300.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian	1 Dokumen	300.000.000	

	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
2.18.0 2.2.01. 0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	150.000.000	
2.18.0 2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 dokumen	391.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Kota Semarang	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 dokumen	391.000.000	
2.18.0 2.2.02. 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	141.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	141.000.000	
2.18.0 2.2.02. 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	
2.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595 Investor	1.201.874.293	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595 Investor	1.201.874.293	
2.18.0 3.2.01	Penyelenggaraan	Kota Semarang	Jumlah Promosi	7 kegiatan	1.201.874.293	Penyelenggaraan	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	1.201.874.293	

	Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Investasi			Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
2.18.0 3.2.01. 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	1.101.874.293	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	1.101.874.293	
2.18.0 3.2.01. 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
2.18.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	2.900.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	2.900.000.000	
2.18.0 4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	2.900.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenang	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	2.900.000.000	

	Kabupaten/ Kota					an Daerah Kabupaten / Kota					
2.18.0 4.2.01. 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/In sentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insen tif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Ko ta	6 Dokumen	950.000.000	Koordinasi dan Sinkronisa si Penetapan Pemberian Fasilitas/I nsentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insen tif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a	6 Dokumen	950.000.000	
2.18.0 4.2.01. 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	900.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	900.000.000	
2.18.0 4.2.01. 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	900.000.000	Penyediaan dan pengelolaa n Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	900.000.000	
2.18.0	Pemantauan , analisis,	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan	750 Kegiatan	150.000.000	Pemantaua n, analisis,	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha	750 Kegiatan Usaha	150.000.000	

4.2.01.0008	evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Usaha		evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	120.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	120.000.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	120.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	120.000.000	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Kota Semarang	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	0 Kegiatan Usaha	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Kota Semarang	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan Usaha	0	

	an Kegiatan Usahanya		dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			merealiskan Kegiatan Usahanya					
2.18.0 5.2.01. 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	20.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	20.000.000	
2.18.0 5.2.01. 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan Usaha	100.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan Usaha	100.000.000	

2.18.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	99%	134.215.642	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	99%	134.215.642	
2.18.0 6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	134.215.642	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	134.215.642	
2.18.0 6.2.01. 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	134.215.642	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	134.215.642	
2.18.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	15.254.270.246	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	15.254.270.246	

KABUPATEN /KOTA					KABUPATE N/KOTA					
		Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%				Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	
2.18.0 1.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	123.626.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	123.626.100
2.18.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	51.345.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	51.345.200
2.18.0 1.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.487.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.487.900

2.18.0 1.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.150.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.150.100	
2.18.0 1.2.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.993.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.993.900	
2.18.0 1.2.01. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.448.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.448.600	
2.18.0 1.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.797.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.797.400	
2.18.0 1.2.01.	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi	3 laporan	2.403.000	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 laporan	2.403.000	

0007	Daerah		Kinerja Perangkat Daerah			Daerah		Perangkat Daerah			
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	10.096.668.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	10.096.668.600	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	9.812.725.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	9.812.725.000	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	279.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	279.000.000	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.798.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.798.400	

2.18.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.347.800	
2.18.0 1.2.02. 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.797.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.797.400	
2.18.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	255.981.640	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	255.981.640	
2.18.0 1.2.05. 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.520.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.520.000	
2.18.0 1.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 unit	190.461.640	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 unit	190.461.640	
2.18.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.669.343.051	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.669.343.051	

2.18.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	639.405.451	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	639.405.451	
2.18.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	91.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	91.000.000	
2.18.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	83.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	83.000.000	
2.18.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	22 dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	22 dokumen	10.000.000	
2.18.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.700.000	
2.18.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	712.530.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	712.530.600	
2.18.0 1.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	84.707.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	84.707.000	

			Elektronik pada SKPD					Elektronik pada SKPD			
2.18.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.162.280.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.162.280.880	
2.18.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	801.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	801.000.000	
2.18.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.361.280.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.361.280.880	
2.18.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	946.369.975	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	946.369.975	
2.18.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	43.959.999	

	Kendaraan Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pajaknya			
2.18.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	503.409.976	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	503.409.976	
2.18.0 1.2.09. 0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	5.000.000	Pemeliharaa n Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	5.000.000	
2.18.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	394.000.000	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	394.000.000	

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Berdasarkan table 2.5. di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Kebutuhan rancangan awal anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 22.156.688.655 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 memiliki 6 (enam) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Program pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal.
3. Adapun jumlah kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dengan 38 (tiga puluh delapan sub kegiatan dan akan bertambah 2 (satu) sub kegiatan saat turunnya anggaran DAK 2025.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 dalam rangka pengarusutamaan gender memiliki agenda kegiatan Binbingan Teknis/Workshop/FGD/Sosialisasi yang terakomodir dalam anggaran 4 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 juga mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Semarang.

2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Khusus untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang telah rutin menyelenggarakan kegiatan untuk jemput bola pelayanan perizinan dan non perizinan ke masyarakat dan pelaku usaha dalam bentuk pelayanan keliling, forum konsultasi Publik, Sosialisasi, dan Pelayanan Akhir Pekan.

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu Pemerintah Kota Semarang diharapkan memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah **Penguatan Fondasi Transformasi**. Adapun transformasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah:

1. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) dalam RPJMN 2025-2029, antara lain:

1. Transformasi Sosial

- a) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- b) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
- c) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
- d) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
- e) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

- a) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- b) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
- d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola

- a) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem pengganjian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
- b) Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

- a) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;

- b) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
 - c) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
 - d) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- a) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
 - b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - c) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”. Tujuan Renstra ini juga merujuk pada tujuan RPJMD Kota Semarang yang ke-3 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing” yang kemudian diwujudkan sebagai tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” yang kemudian juga menjadi tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi ”,

dengan indikator tujuan **“Persentase Peningkatan Nilai Investasi”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Investasi
2. Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tiga Sasaran tersebut memiliki indikator sasaran berikut ini:

1. Nilai investasi
2. Persentase Izin Terbit Sesuai SP
3. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025

	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	7
SASARAN :	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	(dalam juta)	29.277.425
	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	95,5
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	78

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Namun secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” dan tiga indikator sasaran, antara lain; Nilai Investasi, Persentase Izin Terbit sesuai SP, dan Nilai AKIP.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;

6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 (enam) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 (lima) program urusan penanaman modal;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 6 (enam) kegiatan urusan penanaman modal. Dari 6 (enam) kegiatan urusan penanaman modal tersebut, terdapat 2 (dua) sub kegiatan dari 1 (satu) kegiatan yang merupakan kegiatan pendamping Dana Alokasi Khusus kepada Kota Semarang;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 12 sub kegiatan urusan penanaman modal.
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Awal Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 22.156.688.655,- (dua puluh dua milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Tahun 2026 DPMPSTSP Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan (Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			20.451.360.181					22.706.626.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3713 penanam modal	841.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3744 penanam modal	2.803.965.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	2 buah	450.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 buah	1.968.665.538
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	1 Dokumen	300.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	996.208.721

		Kemudahan Penanaman Modal							
2.18.02.2.0 1.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	150.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	972.456.817
2.18.02.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 dokumen	391.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 dokumen	835.299.462
2.18.02.2.0 2.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	141.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	450.000.000
2.18.02.2.0 2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	385.299.462
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595 Investor	1.201.874.293	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		654 Investor	1.290.199.000
2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	1.201.874.293	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		7 kegiatan	1.290.199.000
2.18.03.2.0 1.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.101.874.293	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		6 Dokumen	1.290.199.000

2.18.03.2.0 1.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	0
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	2.900.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		96%	1.249.441.000
2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	2.900.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	2.580.399.000
2.18.04.2.0 1.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	950.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		6 Dokumen	0
2.18.04.2.0 1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	900.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2500 Pelaku Usaha	2.580.399.000
2.18.04.2.0 1.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi	800 Pelaku Usaha	900.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1000 Pelaku Usaha	0

		Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
2.18.04.2.0 1.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	150.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		800 Kegiatan Usaha	0
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	120.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 (nilai)	903.139.000
2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	120.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		7%	903.139.000
2.18.05.2. 01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan Usaha	0	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		15 Kegiatan Usaha	263.139.000

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	20.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		30 pelaku usaha	220.000.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan Usaha	100.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		31 Kegiatan Usaha	420.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	99%	134.215.642	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	1.290.199.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	134.215.642	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	1.290.199.000

	Kabupaten/Kota								
2.18.06.2.0 1.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	134.215.642	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.290.199.000
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	15.254.270.246	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	9.500.000
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%		Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	35.000.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	11.778.339.795
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%		Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	2.015.885.205
2.18.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	123.626.100	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		11 dokumen	9.500.000

2.18.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	51.345.200	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 dokumen	5.000.000
2.18.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.487.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.150.100	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.993.900	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.448.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 laporan	1.797.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 laporan	500.000

		Kinerja SKPD							
2.18.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.403.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 laporan	2.000.000
2.18.01.2.0 1.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		0 dokumen	0
2.18.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	10.096.668.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	11.778.339.795
2.18.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	9.812.725.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		40 orang/bulan	11.566.239.795
2.18.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	279.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	210.000.000
2.18.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.798.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 laporan	700.000
2.18.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18 laporan	1.347.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		18 laporan	700.000

		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD							
2.18.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.797.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 dokumen	700.000
2.18.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	255.981.640	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	35.000.000
2.18.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.520.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		200 unit	35.000.000
2.18.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 unit	190.461.640	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		0 unit	0
2.18.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.669.343.051	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	1.536.000.000
2.18.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	639.405.451	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 paket	250.000.000
2.18.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	91.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 paket	60.000.000
2.18.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	83.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 paket	126.000.000

2.18.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 dokumen	10.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		0 paket	0
2.18.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.700.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 laporan	140.000.000
2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	712.530.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 laporan	590.000.000
2.18.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	84.707.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		3 dokumen	370.000.000
2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.162.280.880	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	85.000.000
2.18.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	801.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 laporan	40.000.000
2.18.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.361.280.880	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 laporan	45.000.000

2.18.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	946.369.975	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	394.885.205
2.18.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	57.000.000
2.18.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	503.409.976	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		34 unit	240.000.000
2.18.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	5.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 unit	47.885.205
2.18.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	394.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 unit	50.000.000

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala DPMPSTP Kota Semarang Nomor 90/050/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

DPMPSTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025; perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.

3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



DIAN SUPARTININGTIAS, S.H., M.Kn.